

## **Takwa: Landasan Spiritual dalam Menghadapi Ketimpangan Ekonomi dan Mewujudkan Keadilan Sosial**

Dedi Susanto<sup>1</sup>, Achmad Abubakar<sup>2</sup>, Muhammad Galib<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, e-mail: dedisusantoktg@gmail.com

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, e-mail: achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, e-mail: muhammad.galib@yahoo.com

### **Histori Naskah**

*Diserahkan:*  
28-11-2024

*Direvisi:*  
28-01-2025

*Diterima:*  
29-01-2025

### **Keywords**

: *piety, social justice, economic inequality*

### **ABSTRACT**

*This research examines the role of piety in promoting social justice, with a particular focus on the growing economic inequality in society. Piety, defined as moral and spiritual awareness of responsibility to God, is expected to motivate individuals and communities to act justly and contribute to the improvement of social welfare. Using a descriptive qualitative approach, this study integrates the concept of piety with the theory of social justice proposed by John Rawls, which emphasizes the importance of fair and equitable distribution of resources. The results show that piety has great potential as a driver of inclusive and equitable social policies, encouraging individuals to care more about others. However, challenges in its implementation, including ambiguity in understanding and misuse of piety values to justify injustice, remain to be overcome for piety to truly become a tool for change. The findings are expected to make a significant contribution to the development of more just and equitable public policies, and inspire concrete actions in a more prosperous society.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji peran takwa dalam mendorong keadilan sosial, dengan fokus khusus pada ketimpangan ekonomi yang semakin meningkat di masyarakat. Takwa, yang diartikan sebagai kesadaran moral dan spiritual terhadap tanggung jawab kepada Tuhan, diharapkan dapat memotivasi individu dan masyarakat untuk bertindak adil serta berkontribusi pada perbaikan kesejahteraan sosial. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengintegrasikan konsep takwa dengan teori keadilan sosial yang dikemukakan oleh John Rawls, yang menekankan pentingnya distribusi sumber daya yang adil dan merata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa takwa memiliki potensi besar sebagai pendorong kebijakan sosial yang inklusif dan berkeadilan, mendorong individu untuk lebih peduli terhadap sesama. Namun, tantangan dalam implementasinya, termasuk ambiguitas pemahaman dan penyalahgunaan nilai-nilai takwa untuk membenarkan ketidakadilan, tetap perlu diatasi agar takwa benar-benar menjadi alat perubahan. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan publik yang lebih adil dan merata, serta menginspirasi tindakan nyata dalam masyarakat yang lebih sejahtera.

### **Kata Kunci**

: takwa, keadilan sosial, ketimpangan ekonomi

### **Corresponding Author**

: Dedi Susanto, e-mail: dedisusantoktg@gmail.com

## PENDAHULUAN

Dalam konteks keadilan sosial, konsep *takwa* sering disebut sebagai pendorong moral yang mampu memotivasi individu dan masyarakat untuk bertindak adil dan merata (Kemenag, 2024). *Takwa*, yang berarti kesadaran akan tanggung jawab kepada Tuhan, bukan hanya kualitas individu, tetapi juga harus tercermin dalam sistem sosial yang mendukung keadilan sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam surat An-Nahl: 90. Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan dan kebajikan merupakan nilai yang harus dijunjung tinggi oleh individu dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan yang menyatakan bahwa *takwa* harus memadukan nilai spiritual dengan praktik sosial, mendorong individu untuk tidak hanya menjaga hubungan baik dengan Tuhan, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang adil (Ramadhanisa et al., 2022). *Takwa* juga mengajarkan empati dan kepedulian kepada sesama sehingga masyarakat yang bertakwa cenderung mengambil tindakan kolektif untuk memperbaiki kehidupan bersama, terutama bagi mereka yang kurang beruntung (Irsyadi, 2024). *Takwa* tidak hanya merupakan kesadaran individu terhadap Tuhan, tetapi juga harus tercermin dalam sistem sosial yang adil, mendorong empati, kepedulian, dan tindakan kolektif untuk kesejahteraan bersama.

Meskipun *takwa* sejatinya menuntun individu dan masyarakat menuju keadilan, dalam beberapa kasus konsep ini justru disalahgunakan untuk membenarkan ketidakadilan dan mempertahankan status quo. Misalnya, dalam konteks sosial dan ekonomi, ada kelompok yang menekankan *takwa* sebagai kepasrahan total kepada Tuhan, sehingga mengabaikan upaya kritis untuk memperbaiki ketimpangan sosial (Ramadhani, 2022). Di beberapa komunitas, dalih *takwa* digunakan untuk meredam protes terhadap ketidakadilan, dengan dalil bahwa segala sesuatu telah ditetapkan oleh Tuhan dan harus diterima tanpa perlawanan (Qurtuby, 2018). Dalam politik, ada pemimpin yang memanfaatkan konsep *takwa* untuk menjustifikasi otoritarianisme, mengklaim bahwa ketaatan kepada penguasa adalah bagian dari ketakwaan, meskipun kebijakan yang diterapkan merugikan rakyat (Pradana et al., 2022). Praktik semacam ini menunjukkan bahwa tanpa pemahaman yang benar, *takwa* bisa menjadi alat legitimasi bagi ketimpangan sosial dan bukan sebagai pendorong perubahan menuju keadilan yang sesungguhnya.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti peran nilai-nilai spiritual dalam mengatasi ketimpangan ekonomi dan mewujudkan keadilan sosial. Murtazam (2021) dalam tesisnya "Pemberantasan Kemiskinan Berbasis Taqwa (Studi Paradigmatik Al-Quran)" menegaskan bahwa *takwa* memiliki dimensi teologis, ibadah, dan sosial yang dapat mendorong individu untuk keluar dari kemiskinan serta membantu mereka yang lemah secara ekonomi melalui dorongan spiritual dan bantuan sosial (Murtazam, 2021). Selain itu, Sakni (2013) dalam artikelnya "Konsep Ekonomi Islam dalam Mengentaskan Kesenjangan Sosial: Studi atas Wacana Filantropi Islam dalam Syari'at Wakaf" menyoroti bahwa konsep filantropi Islam, seperti wakaf, berperan penting dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi melalui distribusi sumber daya yang lebih adil (Sakni, 2013). Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai spiritual dalam praktik ekonomi dapat menjadi landasan efektif dalam menghadapi ketimpangan ekonomi dan mewujudkan keadilan sosial.

Penelitian ini menekankan pentingnya memahami *takwa* sebagai pendorong keadilan sosial, terutama di tengah meningkatnya ketimpangan ekonomi global. Ketimpangan ini menyebabkan berbagai masalah seperti kesenjangan pendapatan, akses yang tidak merata terhadap pendidikan dan kesehatan, hingga rendahnya kesejahteraan masyarakat miskin. Sebagai landasan moral dan spiritual, *takwa* dapat memotivasi individu untuk bertindak sesuai nilai kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Konsep ini sejalan dengan teori keadilan sosial John

Rawls dalam *A Theory of Justice* (1971), yang menekankan bahwa keadilan harus menjadi prinsip utama dalam struktur sosial untuk mencapai distribusi yang adil.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian kepustakaan. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk mengeksplorasi nilai moral dan spiritual dalam konsep *takwa* serta hubungannya dengan keadilan sosial. Sumber primer berasal dari literatur yang menunjukkan ketimpangan ekonomi seperti data rasio gini di Indonesia yang dirilis Badan Pusat Statistik, sedangkan data sekunder meliputi jurnal ilmiah, literatur klasik, dan kajian tentang keadilan sosial. Teknik analisis data dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan gambaran menyeluruh tentang peran *takwa* dalam memperjuangkan keadilan sosial. Proses ini mencakup pengolahan informasi dari Al-Qur'an, literatur ilmiah, dan interpretasi tafsir untuk menyusun argumen yang reflektif dan aplikatif. Dengan pendekatan ini, penelitian menyatukan nilai-nilai spiritual dengan realitas sosial untuk memberikan kontribusi nyata dalam memahami bagaimana *takwa* dapat memotivasi tindakan kolektif menuju keadilan sosial. Analisis data juga menerapkan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi (Miles & Huberman, 1994).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Ketimpangan Ekonomi sebagai Tantangan Utama dalam Mencapai Keadilan Sosial

Ketimpangan ekonomi di Indonesia menjadi tantangan signifikan dalam upaya mencapai keadilan sosial. Meskipun data menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir, disparitas antara kelompok pendapatan masih memprihatinkan. Pada Maret 2024, rasio Gini Indonesia tercatat sebesar 0,379, menurun dari 0,388 pada Maret 2023 (Indonesia, 2024). Penurunan ini menunjukkan perbaikan, namun angka tersebut masih mengindikasikan adanya ketimpangan yang cukup tinggi. Ketimpangan ini tidak hanya terlihat dalam distribusi pendapatan, tetapi juga dalam akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Distribusi pendapatan yang tidak merata dan tidak adil menimbulkan perbedaan segmen dalam masyarakat dan berdampak negatif terhadap keadilan sosial.

Ketimpangan ekonomi dapat menghambat mobilitas sosial, di mana individu dari latar belakang ekonomi rendah kesulitan meningkatkan taraf hidup mereka. Hal ini berpotensi menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus, menghambat pembangunan manusia, dan memperburuk ketidakadilan sosial (Dinata, 2021). Oleh karena itu, mengatasi ketimpangan ekonomi menjadi krusial untuk memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk mencapai keadilan sosial, diperlukan kebijakan yang fokus pada pemerataan distribusi pendapatan dan peningkatan akses terhadap layanan dasar. Langkah-langkah seperti peningkatan kualitas pendidikan, perluasan akses layanan kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja yang inklusif dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi (Putri et al., 2023). Dengan demikian, setiap individu memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi dan menikmati hasilnya secara adil.

Ketimpangan ekonomi di Indonesia tetap menjadi tantangan utama dalam mencapai keadilan sosial, meskipun terdapat tren penurunan rasio Gini dalam beberapa tahun terakhir. Disparitas dalam distribusi pendapatan dan akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, masih menciptakan ketidaksetaraan yang signifikan di masyarakat. Ketimpangan ini tidak hanya menghambat mobilitas sosial, tetapi juga memperburuk siklus kemiskinan yang sulit diputus, sehingga semakin memperlebar jurang ketidakadilan sosial.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang berfokus pada pemerataan ekonomi, seperti peningkatan kualitas pendidikan, perluasan akses kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja yang inklusif. Dengan memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, keadilan sosial dapat diwujudkan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, tantangan struktural yang mendasari masalah ini masih belum sepenuhnya teratasi. Model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan sering kali mengabaikan distribusi hasil ekonomi yang lebih adil, sehingga kelompok ekonomi lemah tetap terpinggirkan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Selain itu, ketimpangan ekonomi yang berkelanjutan dapat memperkuat oligarki ekonomi dan politik, di mana kelompok elite memiliki kendali yang lebih besar atas kebijakan publik, sering kali dengan mengorbankan kepentingan kelompok miskin. Hal ini memperburuk siklus ketidakadilan sosial, karena tanpa intervensi yang lebih progresif—seperti reformasi pajak yang lebih adil, redistribusi aset, dan investasi besar dalam pendidikan serta kesehatan bagi kelompok rentan—ketimpangan akan terus berlanjut dan bahkan semakin mengakar. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan tidak cukup hanya berupa peningkatan akses terhadap layanan dasar, tetapi juga menuntut reformasi kebijakan ekonomi yang lebih radikal guna memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar inklusif dan berkontribusi terhadap keadilan sosial secara substansial.

## **B. Peran Takwa dalam Menginspirasi Kebijakan Sosial yang Adil**

Relevansi takwa sebagai nilai moral dan spiritual dalam kebijakan sosial menjadi subbahasan penting dalam penelitian ini. Takwa, yang merujuk pada kesadaran dan ketaatan kepada Tuhan, tidak hanya menjadi aspek pribadi dalam kehidupan individu, tetapi juga memiliki potensi besar untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan publik. Berdasarkan temuan lapangan dan kajian teoritis, ada kemungkinan bahwa prinsip-prinsip takwa dapat diintegrasikan dalam pengembangan kebijakan sosial yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian, takwa diharapkan dapat menjadi pendorong bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan aspek distribusi sumber daya yang adil dan merata di masyarakat.

Prinsip takwa seharusnya menginspirasi pengambilan keputusan yang berbasis pada nilai-nilai kepedulian, keadilan, dan empati. Dalam konteks ini, kebijakan sosial yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok-kelompok marginal, seperti masyarakat miskin, dapat dianggap sebagai penerapan konkret dari nilai takwa. Contohnya, program-program yang memberikan subsidi pangan, layanan kesehatan gratis, atau pendidikan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu, menunjukkan bagaimana nilai-nilai spiritual ini bisa terwujud dalam praktik sosial yang nyata. Kebijakan-kebijakan semacam ini mencerminkan komitmen untuk mengurangi ketimpangan sosial dan menciptakan lingkungan yang lebih adil.

Lebih jauh lagi, penerapan takwa dalam kebijakan publik berpotensi membentuk masyarakat yang lebih kohesif dan harmonis. Ketika nilai-nilai moral diinternalisasikan dalam proses pembuatan kebijakan, diharapkan akan muncul kesadaran kolektif di antara masyarakat untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain. Hal ini tidak hanya memperkuat solidaritas sosial, tetapi juga menciptakan iklim di mana semua individu merasa dihargai dan diperhatikan.

Integrasi takwa dalam kebijakan sosial mencerminkan upaya untuk menghubungkan dimensi moral dan spiritual dengan realitas struktural yang sering kali diwarnai oleh ketimpangan sosial dan ekonomi. Namun, tantangan utama dalam penerapan konsep ini

terletak pada bagaimana memastikan bahwa nilai-nilai takwa tidak hanya menjadi sekadar retorika normatif, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, kebijakan sosial yang berlandaskan takwa harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan prinsip keadilan distributif, sehingga tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan. Selain itu, pendekatan ini menuntut adanya sinergi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat sipil untuk menciptakan mekanisme pengawasan yang mencegah manipulasi nilai takwa demi kepentingan kelompok tertentu. Jika takwa benar-benar diinternalisasikan sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan, maka diharapkan akan lahir sistem yang lebih inklusif, di mana program sosial seperti subsidi, pendidikan gratis, dan layanan kesehatan untuk kelompok rentan tidak hanya bersifat karitatif, tetapi menjadi bagian dari komitmen struktural negara dalam mewujudkan keadilan sosial. Oleh karena itu, tantangan utama bukan hanya dalam merumuskan kebijakan yang selaras dengan nilai-nilai takwa, tetapi juga dalam memastikan bahwa kebijakan tersebut diimplementasikan dengan cara yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

### C. Tantangan Implementasi Takwa dalam Praktik Keadilan Sosial

Meskipun takwa memiliki potensi besar untuk mendorong keadilan sosial, terdapat sejumlah tantangan yang menghalangi implementasinya secara efektif. Salah satu tantangan utama adalah ambiguitas dalam pemahaman mengenai takwa itu sendiri. Dalam beberapa kasus, nilai takwa yang seharusnya mendorong keadilan dan kebaikan justru disalahartikan dan digunakan sebagai alat pembenaran untuk mempertahankan ketidakadilan. Ada situasi di mana takwa dimanfaatkan untuk memperkuat status quo. Pihak-pihak tertentu mungkin menggunakan nilai-nilai spiritual ini untuk melanggengkan ketidaksetaraan dan menolak perubahan yang lebih adil, menciptakan kerugian bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Fenomena ini mencerminkan perlunya pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan takwa. Agar nilai-nilai takwa dapat berkontribusi secara positif terhadap keadilan sosial, diperlukan komitmen kolektif yang memastikan bahwa nilai-nilai tersebut tidak disalahgunakan. Pemahaman yang benar mengenai takwa seharusnya mencakup dua dimensi penting: hubungan yang baik dengan Tuhan dan hubungan yang adil dengan sesama manusia. Takwa bukan hanya sekadar ritual atau bentuk ketaatan individual, tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan sosial yang mencerminkan keadilan, empati, dan kepedulian terhadap sesama.

John Rawls dalam *A Theory of Justice* (1971) mengembangkan teori keadilan sebagai *justice as fairness*, yang menekankan prinsip kesetaraan dan distribusi yang adil dalam masyarakat. Rawls mengajukan dua prinsip keadilan: pertama, setiap individu memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang seluas-luasnya, sejauh kebebasan tersebut tidak mengurangi kebebasan orang lain; kedua, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling kurang beruntung (*difference principle*) serta posisi dan jabatan dalam masyarakat harus terbuka bagi semua berdasarkan kesetaraan kesempatan. Rawls juga memperkenalkan konsep "posisi asali" (*original position*) dan "tirai ketidaktahuan" (*veil of ignorance*), yang menekankan bahwa aturan keadilan harus dirancang tanpa mempertimbangkan kepentingan pribadi atau posisi sosial seseorang, sehingga menghasilkan sistem yang adil bagi semua anggota masyarakat (Rawls, 1971).

Konsep takwa yang idealnya menjadi pendorong keadilan sosial sering kali menghadapi tantangan dalam implementasinya, terutama akibat ambiguitas pemahaman yang dapat menyebabkan penyalahgunaan nilai-nilainya. Dalam konteks ini, takwa terkadang

dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk mempertahankan status quo dan menolak perubahan yang lebih adil, yang justru bertentangan dengan esensi keadilan sosial itu sendiri. Jika ditinjau dari perspektif John Rawls dalam *A Theory of Justice* (1971), fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi keadilan, di mana nilai-nilai yang seharusnya mendukung kesejahteraan kelompok kurang beruntung malah dijadikan alat untuk melanggengkan ketidaksetaraan. Rawls menegaskan bahwa prinsip keadilan harus didasarkan pada posisi asali dan tirai ketidaktahuan, di mana aturan sosial seharusnya dirancang tanpa mempertimbangkan kepentingan pihak tertentu. Dalam hal ini, pemahaman takwa yang parsial dan manipulatif justru bertentangan dengan prinsip keadilan yang mengutamakan kesempatan yang setara bagi semua individu.

Agar takwa benar-benar menjadi instrumen yang mendorong keadilan sosial, diperlukan pemaknaan yang lebih mendalam dan komprehensif, sebagaimana yang ditekankan dalam teori Rawls mengenai *justice as fairness*. Pemahaman takwa yang benar seharusnya tidak hanya mencerminkan hubungan vertikal dengan Tuhan, tetapi juga hubungan horizontal yang adil dengan sesama manusia. Dalam konteks Rawls, ini selaras dengan prinsip kesetaraan kebebasan dasar dan distribusi manfaat yang lebih besar bagi kelompok yang kurang beruntung. Dengan demikian, nilai-nilai takwa perlu dikontekstualisasikan dalam sistem sosial yang memastikan bahwa kebebasan individu tidak digunakan untuk menindas pihak lain, tetapi justru mendorong kesetaraan dan kesejahteraan bersama. Implementasi takwa yang sesuai dengan prinsip keadilan Rawlsian akan menjadikannya sebagai kekuatan transformatif yang benar-benar dapat mengatasi ketidaksetaraan dan menciptakan tatanan sosial yang lebih adil. Pemanfaatan konsep takwa dalam membangun keadilan sosial harus dikritisi agar tidak menjadi alat legitimasi bagi ketimpangan yang justru bertentangan dengan esensinya. Seperti yang dikemukakan oleh John Rawls dalam *A Theory of Justice* (1971), keadilan seharusnya didasarkan pada prinsip *justice as fairness*, di mana kebebasan dasar dijamin dan ketidaksetaraan hanya dapat diterima jika menguntungkan kelompok yang paling rentan. Namun, dalam realitas sosial, nilai takwa sering kali mengalami distorsi ketika dimanfaatkan oleh kelompok dominan untuk mempertahankan status quo, sehingga akses terhadap hak-hak dasar dan peluang ekonomi menjadi tidak merata. Kontradiksi ini menunjukkan bahwa tanpa pemaknaan yang kritis dan kontekstual, takwa dapat kehilangan peran transformatifnya sebagai landasan moral bagi keadilan. Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi nilai-nilai takwa yang tidak hanya menekankan aspek spiritual, tetapi juga menuntut tanggung jawab sosial dalam menciptakan kesetaraan yang lebih substantif, selaras dengan prinsip keadilan Rawlsian yang menolak ketimpangan yang tidak beralasan.

## PENUTUP

Ketimpangan ekonomi di Indonesia tetap menjadi tantangan besar dalam mewujudkan keadilan sosial, meskipun tren penurunan rasio Gini menunjukkan adanya perbaikan. Ketimpangan ini tidak hanya terbatas pada aspek pendapatan, tetapi juga mencakup akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, yang berkontribusi pada siklus kemiskinan yang sulit diputus. Oleh karena itu, kebijakan pemerataan ekonomi yang inklusif, seperti reformasi pajak progresif, redistribusi aset, dan peningkatan investasi di sektor publik, menjadi kebutuhan mendesak. Di sisi lain, nilai takwa sebagai aspek moral dan spiritual memiliki potensi untuk menginspirasi kebijakan sosial yang lebih adil, tetapi implementasinya menghadapi tantangan, termasuk kemungkinan penyalahgunaan oleh kelompok tertentu untuk mempertahankan status quo. Perspektif keadilan Rawlsian menunjukkan bahwa kebijakan yang didasarkan pada nilai takwa harus memastikan bahwa distribusi sumber daya dan kesempatan benar-benar menguntungkan kelompok paling rentan. Oleh karena itu, diperlukan

pendekatan yang lebih kritis dan kontekstual dalam menginternalisasi nilai takwa ke dalam kebijakan sosial, sehingga bukan sekadar menjadi retorika normatif, tetapi benar-benar berkontribusi terhadap transformasi sosial yang lebih adil dan berkelanjutan.

Limitasi penelitian ini terletak pada keterbatasan dalam mengukur secara langsung pengaruh nilai takwa terhadap kebijakan sosial di Indonesia, karena faktor-faktor sosial dan politik yang kompleks sering kali mempengaruhi implementasi kebijakan secara praktis. Selain itu, penelitian ini lebih menekankan pada perspektif teoretis dan tidak melibatkan analisis empiris yang mendalam terkait bagaimana takwa diterapkan dalam kebijakan sosial yang konkret. Oleh karena itu, penelitian mendatang perlu memperluas cakupan dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif atau kuantitatif yang melibatkan analisis data lapangan, seperti wawancara dengan pembuat kebijakan atau survei masyarakat, untuk mengevaluasi sejauh mana nilai takwa memengaruhi keputusan kebijakan. Selain itu, penelitian lanjutan bisa memperluas kajian pada kebijakan sosial yang berbasis agama di negara-negara dengan konteks budaya dan ekonomi yang berbeda, untuk memperbandingkan pengaruh takwa dalam menciptakan keadilan sosial di tingkat internasional.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Dinata, M. P. (2021, April 7). *Website DJKN*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-lhokseumawe/baca-artikel/13833/Menakar-Keadilan-Sosial-di-Masa-Pandemi.html>
- Indonesia, B. P. S. (2024, July 1). *Gini ratio Maret 2024 tercatat sebesar 0,379*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2371/gini-ratio-maret-2024-tercatat-sebesar-0-379-.html>
- Irsyadi, M. (2024, March 21). *Khutbah Jumat: Ramadhan Momentum Tumbuhkan Jiwa Kepedulian*. NU Online. <https://nu.or.id/khutbah/khutbah-jumat-ramadhan-momentum-tumbuhkan-jiwa-kepedulian-MGevt>
- Kemenag. (2024, March 30). *Lebih Dekat Kepada Takwa*. <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/lebih-dekat-kepada-takwa>  
<https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/lebih-dekat-kepada-takwa>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (R. Holland, Ed.; 2nd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Murtazam, T. (2021). *Pemberantasan Kemiskinan Berbasis Taqwa (Studi Paradigmatik Al-Quran)* [Masters, UIN Ar-Raniry]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/21998/http://repository.ar-raniry.ac.id>
- Pradana, M. Y. A., Parasmana, M., Fajrin, H., & Fadilah, M. F. (2022). Politisasi Agama dalam Ranah Konflik di Indonesia (Sebuah Tinjauan Kritis). *SOSIORELIGIUS: JURNAL ILMIAH SOSIOLOGI AGAMA*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.24252/sosioreligius.v7i1.30716>
- Putri, D. F., Andriani, Sari, W. R., & Nabbila, F. L. (2023). PROBLEMATIKA KETIMPANGAN EKONOMI DALAM SISTEM EKONOMI DI INDONESIA. *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN*, 1(4), Article 4. <https://doi.org/10.61722/jiem.v1i4.330>
- Qurtuby, S. A. (2018). Sejarah Politik Politisasi Agama dan Dampaknya di Indonesia. *MAARIF*, 13(2), Article 2. <https://doi.org/10.47651/mrf.v13i2.21>
- Ramadhani, H. (2022). Qadariyah Dan Jabariyah: Sejarah dan Perkembangannya. *EDU-RILIGIA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Dan Keagamaan*, 4(3), Article 3. <https://doi.org/10.47006/er.v4i3.12887>
- Ramadhanisa, H., Marisa, S. N., & Mairizal, T. (2022). ANALISIS MAKNA TAKWA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KONSEP ESQ ARY GINANJAR DAN RELEVANSINYA DENGAN ALQURAN. *Basha'ir: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.47498/bashair.v2i2.1542>
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice: Original Edition*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctvjf9z6v>
- Sakni, A. S. (2013). KONSEP EKONOMI ISLAM DALAM MENGENTASKAN KESENJANGAN SOSIAL: Studi atas Wacana Filantropi Islam dalam Syari'at Wakaf. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama*, 14(1), Article 1. <https://doi.org/10.19109/jia.v14i1.466>